

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia tidak pernah tau dengan namanya system pusat, sebagaimana dibuktikan dalam UUD 1945 Pasal 18 tentang pemerintah daerah. Sejak saat itu, muncul gerakan reformasi 1998 yang menyerukan pelaksanaan autonomi daerah dari pemerintah pusat. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah akhirnya memberikan otonomi daerah yang seluasnya kepada setiap wilayah di Negara ini.

Pemberian otonomi daerah yang luas kepada daerah diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pemerintah daerah yang meliputi kepuasan masyarakat, dengan meningkatkan mutu keadilan nasional, pelayanan, pemberdayaan dan lainnya. Tidak hanya itu, pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah harus bekerja secara berkualitas dan tepat untuk dapat mendukung partisipasi warga dalam upaya peningkatan pemerataan dengan menggunakan semua potensi yang ada di setiap daerahnya masing-masing.

Dalam mendorong jalanya otonomi daerah, menurut UU No.32 Tahun 2004, selanjutnya diamandemen dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah atau otonomi daerah serta dalam UU No.1 Tahun 2022 perihal Perimbangan Keuangan pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah dan aturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 perihal Pemanfaatan Keuangan Daerah.

Pemerintah daerah harus mandiri dalam pengelolaan dan pembangunan pembelanjaan. Anggaran daerah saat ini tidak selalu atau harus lebih banyak dari pusat, tetapi untuk saat ini sebagian besar berasal dari sumber daerah yang sama. Dalam maksud berarti pemerintahan daerah mempunyai tanggungjawab yang sangat besar ketika menggunakan keuangan daerahnya.

Di dalam tafsir luas Undang-Undang no.1 Tahun 2022 mengatur bahwasanya pelaksanaan kegunaan pemerintah daerah akan tercapai dengan baik ketika pelaksanaannya urusan pemerintahan dibarengi oleh penyediaan asal pendapatan sangat cukup bagi daerah, yang menjadi acuan pada UU perihal pertimbangan keuangan pemerintahan negara dan daerah.

Pemerintahan wilayah yang dimensinya memadai dan selaras kepada pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan wilayah.

Asal pendanaan yang tepat untuk sebagian kesepakatan pemerintahan yang disampaikan ke daerah jadi asal mula pendanaan daerah. Oleh sebab itu, pemerintahan daerah perlu sangat berhati-hati dalam mengawal dan mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang nantinya akan berkembang menjadi pendapatan daerah.

Syarat yang sangat perlu untuk memahami dengan jelas tentang keahlian daerah dalam mengelola dan menjalankan keluarga merupakan kemampuan untuk mandiri dalam aspek keuangan. Dalam menilai tingkat keahlian suatu daerah untuk mewujudkan otonominya, faktor yang menentukan adalah faktor keuangan. Apabila suatu wilayah sanggup mendanai pelaksanaan pemerintahan daerahnya dengan capaian ketergantungan tertentu kepada pemerintahan pusat, maka kapasitas tersebut berkurang.

Juga terkait pajak daerah yang salah satunya adalah pajak pendapatan, dengan sampai saat ini pemerintah wilayah membuat segala sesuatu yang menunjang jalanya usaha dalam pengadaan infrastruktur, permohonan izin dan kondisi perdagangan yang aman, tapi sampai saat ini daerah belum mendapatkan “penyertaan dalam penerimaan pajak” dari kuitansi. Menurut uu no.17 Tahun 2000, Daerah akan menerima sebagian anggaran sebesar sekitar 20%, khusus sebagai obyek pajak orang pribadi, tetapi sebagai obyek perusahaan, daerah tak menerimanya.

Dengan munculnya permasalahan di atas, maka daerah akan masih membutuhkan pada kontribusi pemerintah pusat, yang jelas-jelas akan menjadi ketergantungan pemerintahan pusat. Fenomena ini menjadi alasan yang memperumit otonomi daerah dalam pengelolaan keluarganya. Daerah akan selalu kesulitan mengelola dan mengurus asal pendapatan asli daerah (PAD).

Penilaian capaian potensi keuangan daerah yang sering dilaksanakan hari ini, diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat perbedaan hubungan antara PAD dan APBD. Tolok ukurnya adalah semakin besar peran PAD kepada APBD, yang memperlihatkan

ketergantungan daerah terhadap pemerintahan pusat semakin berkurang. Yang menjadi bagian dari PAD yaitu; (1) pajak provinsi, (2) pajak kabuypaten/kota.

Yang perlu diingat ialah bahwa kenaikan PAD tidak artinya bahwa masing-masing daerah bersaing untuk mendapatkan pajak yang baru, akan tetapi daerah diinginkan mempunyai tingkat kemandirian yang baik dan kelihaian untuk melihat serta menggunakan setiap potensi sumber. Di sisi lain, Ketidaksanggupan pemerintahan daerah untuk menelusuri serta memanfaatkan potensi asal pendapatan yang sudah ada akan menyebabkan penurunan keahlian keuangan daerah yang pada bagianya akan menghalangi jalanya otonomi daerah.

Dengan dipilihnya usaha sebagai akibat dari konsep desentralisasi, perlu kehati-hatian dalam memvisualisasikan dan mengelola sumber pendapatan daerah di Kabupaten Garut. Dari situ kita akan dapat menganalisis apakah pemerintah Kabupaten Garut sanggup memanfaatkan semua asal pendapatan yang sudah ada agar memajukan ataupun memandu terwujudnya otonomi daerah.

Atas dasar penjelasan di atas, maka penulis dialihkan untuk melaksanakan penelitian di BPKAD Kabupaten Garut dengan judul “ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM Mendukung PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2018-2021”

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi dasar latar belakang tersebut, penulis tergugah untuk membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Garut tahun 2018-2021?.

C. Tujuan penelitian

Berbasis Rumus pertanyaan di atas tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perkembangan kemampuan peluang keuangan daerah untuk menunjang lancarnya jalan otonomi daerah di kabupaten Garut tahun 2018-2021.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diinginkan dari peneliti ini :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman dalam mengimplementasikan potensi keuangan daerah untuk menunjang jalanya otonomi daerah di Kabupaten Garut.
2. Memberikan pilihan pemikiran melalui penelitian ini di pelaksanaan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam menunjang jalanya otonomi daerah.
3. Sebagai sumber pemikiran untuk penelitian sejenis dan sejenis berikutnya.
4. Studi ini berguna bagi segala pihak yang mempunyai kepentingan dan dapat memberikan tautan terhadap pembaca.

E. Kerangka Pemikiran

Jelasnya untuk menilik seperti apa penelitian ini berlangsung dapat dilihat



Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian

Dari sudut pandang, tujuan penelitian adalah jalanya otonomi daerah di Kabupaten/kota Garut dilihat dari peluang keuangan daerah sama terhadap konsep otonomi daerah serta mekanisme fiskal daerah. Pola penilaian kecukupan keuangan yang dipakai oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional adalah indeks yang digunakan dalam pengukuran ini.

Keterkaitan antara konsep otonomi daerah dan keuangan daerah digunakan sebagai sebagai dasar tujuan utamanya adalah untuk mengukur tingkat otonomi daerah dalam pembiayaan administrasi publik daerah dengan cara meminimalkan tingkatan ketergantungan kepada pusat.

Semakin tinggi derajat kemandirian daerah dari pemerintah pusat, maka daerah tersebut dapat disebut lebih sukses dalam menjalankan tanggungjawab daerahnya.

F. Hipotesis

Ho : adanya perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Garut tahun 2018-2021.

Ha : tidak adanya perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Garut tahun 2018-2021.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa banyak penelitian sebelumnya yang konsisten dengan penelitian ini, maka penulis melakukan studi pustaka terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian pertama dijalankan Yanuar Frediyanto (2010) dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Kapasitas Keuangan Kabupaten atau kota di wilayah Jawa Tengah, Sesudah dan Sebelum Kebijakan Otonomi Daerah”. Tujuan dilakukannya penelitian ini merupakan untuk menganalisa kemampuan keuangan kabupaten serta kota di Jawa Tengah sesudah dan sebelum otonomi daerah ada.
2. Kajian kedua dilakukan oleh Laedy Tamboto (Hasil dari observasi ini dengan judul “Analisa Kapasitas Keuangan Daerah Pada jaman Otonomi Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara” 140. Efisiensi dan Produktivitas Wilayah Kabupaten atau kota di Minahasa Tenggara Selama Masa tahun anggaran 2008-2012. Dalam Penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Untuk hasil persamaan dan perbedaan penelitian di atas dapat ditelaah pada gambar dibawah ini :

Tabel 1

Hasil Penelitian Sebelumnya

Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
----------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------



<p>Yanuar Frediyanto</p>	<p>“Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Ssudah dan Sebelum adanya Kebijakan Otonomi Daerah” (2010)</p>	<p>Terdapat beberapa perbedaan yang sangat terlihat antara sesudah dan sebelum adanya otonomi daerah, terkecuali terhadap PAD. Pemerintah daerah berusahan memperbaiki penerimaan PAD lewat peningkatan pendapatan pajak dan retribusi. Dengan meningkatkan PAD tersebut tidak secara</p>	<p>Penelitian yang sama yaitu mengenai kemampuan keuangan daerah</p>	<p>Lokus yang diteliti berbeda, Yanuar membandingkan 36 kota/kabupaten satu dengan yang lainnya. Sedangkan penelitian ini hanya meneliti daerah persiapan 1 kota/kabupaten yang terdiri dari 11 kecamatan saja, yang nantinya akan menjadi kabupaten garut Utara. Menggunakan metode deskriptif kualitatif.</p>
------------------------------	---	---	--	---

		<p>otomatis bisa meningkatkan retribusi PAD dalam APBD. Terdapat perbedaan hasil pula antara sesudah dan sebelum adanya otonomi daerah. Pemerintahan daerah pada pelaksanaan otonomi daerah sanggup meningkatkan pendapatan PAD. Sebelum otonomi daerah diberlakukan setiap daerah sebagian besar (88,57%) mempunyai tingkat kesanggupan keuangan yang</p>		
--	--	--	--	--

		<p>minim, hingga lebih banyak memanfaatkan atau ketergantungan terhadap pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan daerahnya satu sama lain.</p>		
Royani	<p>Analisa kesanggupan keuangan daerah dalam mendorong jalanya otonomi daerah di Kabupaten Ponorogo dan Madiun (2012)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan keuangan di kabupaten madiun dan ponorogo masih kurang baik.</p>	<p>Menggunakan metode kualitatif Menggunakan data yang bersumber langsung dari APBD Menggunakan rasio untuk mengukur kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>Dalam penelitian Royani berbeda dari segi lokus, beliau mengambil lokus di madiun dan di ponorogo sedangkan penelitian ini lokus berada di kabupaten garut.</p>
(Laedy Tamboto, 2014)	<p>Analisa kesanggupan keuangan daerah dalam</p>	<p>Hasil terhadap penelitian laedy menyebutkan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan data yang</p>	<p>Lokus penelitian ini berdeda.</p>

	<p>masa otonomi daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara (2014)</p>	<p>yakni masih ada ketidaksanggupan kabupaten minahasa tenggara dalam mengelola PAD, yang menyebabkan masihrendahnya kemandirian dalam menjalankan pengeluaran untuk pembangunan.</p>	<p>bersumber dari APBD. Penelitian sam dengan penelitian ini yaitu membahas tentang kemampuan keuangan daerah</p>	
--	--	---	---	--

Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Sebelumnya